

POTENSI CALON TENAGA KERJA PEMUDA DESA DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN MASA PANDEMI COVID'19

Randi¹⁾, Junaidi²⁾, Mulyanto³⁾, Ridhah Taqwa⁴⁾

¹⁾Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya

²⁾Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

³⁾Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya

⁴⁾Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya

ABSTRAK

Revolusi Industri 4.0 dan Pandemi Covid'19 merupakan tantangan baru bagi masyarakat dunia, kondisi dunia fisik dan digital mengalami perubahan yang signifikan cara hidup kerja manusia, yaitu mengintegrasikan dunia fisik, digital dan biologis, dimana terdapat perubahan secara fundamental dan terobosan baru di semua disiplin ilmu, diantaranya dibidang artificiall intellegent, teknologi nano,bioteknologi, teknologi yang berbasis internet berdampak terhadap kehidupan manusia, memberikan dampak pertumbuhan ekonomi. (Hamdan, 2018). Revolusi industri 4.0 meningkatkan efisiensi, fleksibilitas dan konektivitas lintas batas, juga pelayanan yang lebih cepat, murah, dan spesifik. Namun, teknologi juga semakin meningkatkan akses kesenjangan digital, kesenjangan kompetensi lulusan ilmu sosial dengan kebutuhan industri. Perekrutan pegawai akan semakin berkurang seiring meningkatnya otomatisasi, penggunaan robotik dan meningkatnya sistem kerja fleksibel. Keterbatasan menguasai teknologi bagi tenaga kerja di desa membuat pemuda desa sulit untuk bersaing dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Seharusnya pihak swasta maupun pemerintah tetap perlu memberi prioritas pada target akses ke pekerjaan tetap bagi setiap orang karena disanalah pengembangan pribadi manusia (Vieronica Varbi Sununianti, 2019). Fokus tulisan ini adalah kepada peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan.

Kata kunci: Peningkatan, Teknologi, Pelatihan, Internet, Pemuda

ABSTRACT

Industrial Revolution 4.0 and Pandemic Covid'19 is a new challenge for the world community, the condition of the physical and digital world undergoes a significant change in the way of human life, namely integrating the physical, digital and biological world, where there are fundamental changes and new breakthroughs in all disciplines, including artificial intelligence, nanotechnology, biotechnology, internet-based technology impacting human life, impacting economic growth. (Hamdan, 2018). The 4.0 industrial revolution improved efficiency, flexibility and cross-border connectivity, as well as faster, cheaper, and more specific services. However, technology is also increasing access to digital disparities, competency gaps of social science graduates with industry needs. Employee recruitment will be reduced as automation, robotics use and flexible working systems increase. The limitations of mastering technology for the workforce in the village make it difficult for village youth to compete and get decent jobs. Both the private sector and the government should continue to give priority to the target of access to permanent employment for everyone because that is where human personal development (Sununianti, 2019). The focus of this paper is on improving Human Resources through training.

Keywords: Enhancement, Technology, Training, Internet, Youth

PENDAHULUAN

UU RI No 18 Tahun 2002 menyatakan teknologi sebagai cara atau metode dan proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai untuk pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia. Undang-Undang tersebut telah mengisyaratkan bahwa perkembangan teknologi haruslah dikuasai oleh setiap elemen masyarakat tidak terkecuali masyarakat terkhususnya pemuda di desa Tanjung Medang, dengan Undang-Undang tersebut sebagai akademisi dan peneliti di bidang ilmu sosial tentunya dapat melakukan analisis terhadap setiap permasalahan yang ada dimasyarakat. Mengingat tingkat kemiskinan di desa tanjung medang cukup besar dengan penerima bantuan 74 KK tahun 2019 dalam program keluarga harapan. Tentunya program yang telah dibuat untuk mengentas kemiskinan di desa tanjung medang, dengan adanya pengabdian dan pelatihan komputer/internet yang bekerja sama dengan lembaga Kursus Komputer dan ahli dibidangnya maka perlu dilakukan peningkatan potensi tenaga kerja pemuda di desa. Industri 4.0 dan pandemi covid'19 mengharuskan semua orang untuk berada di dunia maya, tidak hanya bekerja tetapi mencari pekerjaanpun menggunakan teknologi.

Industri 4.0 lahir di Jerman tepatnya di Hannover Fair tahun 2011 (Kagermann dkk, 2011) dalam (Sutopo, 2018). Jerman memiliki kepentingan dan tujuan yang terkait hal Industri 4.0 yang akan menjadi kebijakan rencana pembangunannya kemudian disebut High-Tech Strategy 2020. Kebijakan ini bertujuan agar Jerman menjadi terdepan dalam dunia manufaktur (Heng, 2013) dalam (Sutopo, 2018). Disamping munculnya industry 4.0 dunia juga dihadapkan dengan kondisi pandemic, yaitu pandemic covid'19. Penyakit virus corona 2019 (corona virus disease/COVID-19) adalah termasuk dalam penyakit baru yang diberikan oleh World Health Organization (WHO) yang muncul pada tahun 2019 yang sebagian besar menyerang manusia dan bagi pasien dengan infeksi virus novel corona 2019 yang pertama kali dilaporkan dari kota Wuhan, Cina pada akhir 2019. Penyebaran terjadi secara cepat dan membuat ancaman pandemi baru (Diah Handayani, 2020). Di Indonesia bulan maret 2020 mulai menunjukkan

pasien yang terkena virus. Dengan kondisi ini membuat semua orang mengalami kekhawatiran akan Kesehatan, pekerjaan dan perekonomian.

Berdasarkan observasi oleh peneliti bahwa pemuda desa mengalami kesulitan dalam mengakses teknologi dan internet dimasa industry 4.0 dan pandemi covid'19. Tidak hanya keterbatasan dalam melakukan akses namun dalam pengoperasian merangkapun tidak bisa. Hal ini disebabkan oleh banyak factor, yaitu belum adanya fasilitas belajar terkait teknologi di desa dan keterbatasan biaya untuk dapat belajar teknologi. Langkah memberikan pelatihan kepada pemuda di Desa Tanjung Medang dianggap hal yang tepat dalam meningkatkan keahlian teknologi. Teknologi dapat membantu pemuda dalam mencari lapangan pekerjaan, kemudian dapat membantu untuk promosi barang atau jasa yang ada di desa. Pelatihan teknologi memberikan peluang kepada pemuda untuk dapat menguasai teknologi kelak mampu bersaing di dunia pekerjaan. Karena Sebagian besar platform-platform pekerjaan ada di media internet, seperti aplikasi penyedia pekerjaan.

Fakta yang menarik bahwa pemuda desa yang rentan putus sekolah tidak dapat menguasai komputer ataupun internet, dari itu perlu didukung keahlian komputer yang memadai untuk membantu setiap proses yang ada di masyarakat atau desa baik itu terkait dengan administrasi maupun promosi desa. Kertidakmampuan ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan dan kemandirian masyarakat masih sangat rendah dalam pengelolaan sumber daya yang tersedia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif Pasal 1 ayat (1) Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi dan ayat (2) Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif. Jelas dalam Undang-Undang tersebut bahwa ekonomi kreatif mendapatkan perhatian khusus di Pemerintahan pusat. Fokus tulisan ini pada

Potensi Calon Tenaga Kerja Pemuda Desa di Era Revolusi Industri 4.0 dan Masa Pandemi Covid'19 (Studi pada Pemuda desa Tanjung Medang).

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Jeffrey D.Sach menjelaskan tiga kategori kemiskinan, yaitu: 1) *extreme poverty*, yakni rumah tangga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya; 2) *moderat poverty*, yaitu rumah tangga dapat memenuhi kebutuhan dasar namun sangat minim dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan; dan 3) *relative poverty*, yakni rumah tangga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar, namun berada di bawah rata-rata cara hidup masyarakat di Negara yang bersangkutan (Huraerah, 2019). Kategori kemiskinan tersebut biasanya terjadi di wilayah perdesaan. untuk mengeluarkan masyarakat dari kategori kemiskinan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perlu dilakukan suatu tratmen tersendiri dalam perencanaan pembangunan treatmen ini dapat di berupa pendampingan kepada masyarakat miskin (Musiyam, 2008).

Masyarakat membutuhkan pendampingan dalam menyusun perencanaan dalam pembangunan, sehingga dapat keluar dari garis kemiskinan. Perencanaan tersebut tentu harus dilakukan secara holistik dan kontekstual melalui cara kerja induktif dan empiric. perencanaan tersebut memuat bebearapa hal, yaitu *pertama*, perencanaan diharapkan mampu memperkuat dan meningkatkan perekonomian masyarakat, kemudian mampu meningkatkan mobilisasi masyarakat desa. *Kedua*, perencanaan harus bervariasi sehingga actor mampu menyelesaikan permasalahan sosial. *Ketiga*, perencanaan melalui proses pembelajaran atau pengalaman dari perencanaan sebelumnya sehingga dibutuhkan pembelajaran sosial (social learning). *Keempat*, perencanaan pada dasarnya untuk menjamin efektivitas program di masyarakat dan sebagai kegiatan perencanaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang harus terorganisir, terkoordinasikan, dan terintegrasikan. dengan rapi, cermat, dan berkelanjutan dalam satuan-satuan sosial wilayah tempat (Musiyam, 2008).

Perencanaan pembangunan juga dilakukan dengan memahami keadaan penduduk disuatu daerah atau negara secara demografi. (Mantra, 2003).

Pembangunan kesejahteraan sosial memiliki arti strategis bagi pembangunan nasional ada empat fungsi penting yaitu; 1) fungsi pertama mempertegas dan memperjelas peran penyelenggaraan negara; 2) fungsi kedua mewujudkan cita-cita Negara yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat; kemudian mendorong pertumbuhan pendapatan dan ekonomi masyarakat; dan selanjutnya menaikkan angka indeks pembangunan manusia (Suharto, 2008). Pembangunan juga membutuhkan ruang, baik untuk menggali sumber daya maupun sebagai tempat membangun (Abdoellah, 2016). Desentralisasi yang menguatkan kedudukan daerah dalam mengelola sumber daya alam telah meningkatkan sentimen kedaerahan dan konflik sosial, desentralisasi digunakan di beberapa daerah yang memiliki sumber daya alam untuk memekarkan diri menjadi satu daerah otonom (Abdoellah, 2016). Pembangunan dampaknya adalah ekonomi masyarakat meningkat. Dalam hal ini ekonomi sebagai disiplin yang seringkali cenderung memperlakukan pengambilan keputusan sebagai proses yang bersifat individual, dan secara tradisional ekonom tidak banyak memberikan perhatian pada sebagaimana perilaku dan pilihan individu diletakkan pada konteks sosial yang lebih luas (Field, 2003). Meskipun pada level mikro belum adanya kaitan yang jelas antara modal sosial dengan pertumbuhan ekonomi (Field, 2003).

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan, semua aspek perlu digerakkan, termasuk pemuda, yang dalam hal ini adalah pemuda desa. Strategi untuk pengembangan potensi pemuda desa yaitu dengan bersatunya pemangku kepentingan (stakeholder). Stakeholder mencakup actor yang terlibat dalam proses perumusan dan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Stakeholder kebijakan public disini ada tiga menurut (Putra, 2005) dalam (Suharto, 2007), yaitu *pertama*, stakeholder kunci: stakeholder yang memiliki kewenangan secara legal untuk membuat keputusan. *Kedua* stakeholder primer: yaitu stakeholder yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program atau proyek dimana mereka dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan penyerapan tenaga kerja. *Ketiga*, stakeholder sekunder: dimana stakeholder ini tidak memiliki kaitan, ataupun kepentingan langsung dengan kebijakan, yaitu

program dan proyek, namun memiliki kepedulian dan perhatian sehingga mampu mempengaruhi keputusan legal pemerintah.

METODE

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif dengan tujuan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi mengenai suatu kenyataan sosial. Pelaksanaan metode kualitatif ini dengan mengkombinasikan antara, observasi, wawancara mendalam dan penyebaran kuisisioner. Subjek yang terdiri dari pemuda desa dan masyarakat yang berminat untuk pelatihan. Keberadaan mereka pun mendukung kelancaran penelitian ini, khususnya dalam mengidentifikasi topik peningkatan kemampuan teknologi pemuda desa Tanjung Medang. Kemudian dengan metode ini peneliti dapat mendapatkan informasi dan menarik minat subjek untuk dapat menguasai teknologi terkini dan dapat dimaksudkan agar dapat diketahui secara mendalam mengenai potensi Tenaga Kerja Pemuda Desa di Era Revolusi Industri 4.0 dan Masa Pandemi Covid'19 (Studi pada Pemuda desa Tanjung Medang).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Tenaga Kerja Pemuda di Desa

Dari permasalahan yang ada dilapangan maka didapatkan diskusi ilmiah bahwa pendampingan masyarakat sangatlah penting bagi masyarakat itu sendiri. Penelitian terdahulu oleh Musiyam (2008) bahwa perencanaan ini dilakukan secara holistik dan kontekstual melalui cara kerja induktif dan empirik. *Pertama*, perencanaan diharapkan mampu memperkuat dan meningkatkan perekonomian masyarakat, kemudian mampu meningkatkan mobilisasi masyarakat desa. *Kedua*, perencanaan harus bervariasi sehingga actor mampu menyelesaikan permasalahan sosial. Selain itu juga actor bukanlah pemain tunggal melainkan terdiri dari individu perusahaan-perusahaan dan organisasi masyarakat lokal. *Ketiga*, perencanaan melalui proses pembelajaran atau pengalaman dari perencanaan sebelumnya sehingga dibutuhkan pembelajaran sosial (social learning). *Keempat*, perencanaan pada dasarnya untuk menjamin efektivitas program di masyarakat dan sebagai kegiatan perencanaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang

harus terorganisir, terkoordinasikan, dan terintegrasikan. dengan rapi, cermat, dan berkelanjutan dalam satuan-satuan sosial wilayah tempat (Musiyam, 2008). Sehingga perencanaan dapat dilakukan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Berikut adalah tingkat pengangguran menurut jenis kelamin, data ini sangat penting untuk melihat angka pengangguran di desa berdasarkan jenis kelamin. Dari data sangat menarik terjadinya peningkatan dan pengurangan pada tahun 2018, 2019, dan 2020.

Tabel 1. Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Daerah Jenis Kelamin (Persen)

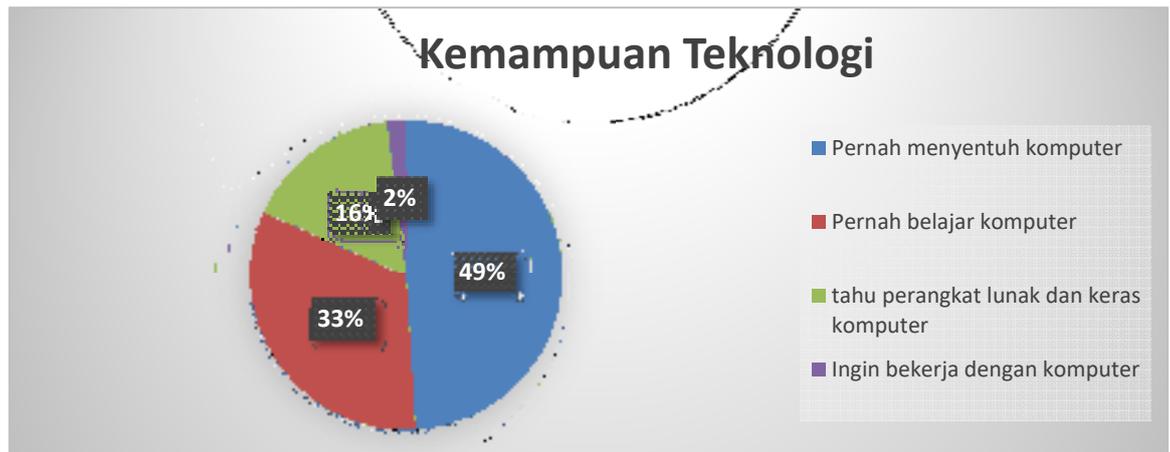
Jenis Kelamin	2018	2019	2020
Perempuan	6,39	6,25	9,30
Laki - Laki	6,75	6,52	10,77

Sumber: Sakernas, BPS, 2020

Dari data diatas menunjukkan bahwa tingkat pengangguran menurut daerah dan jenis kelamin pada tahun 2020 selalu mengalami peningkatan hal ini dibuktikan dengan jumlah total 10,77 untuk laki-laki dan perempuan 9,30. Data ini juga menunjukkan bahwa pengangguran di Indonesia masih cukup besar angkanya. Hal ini tidak hanya dampak dari kurangnya penyerapan tenaga kerja dan tidak adanya skill kerja yang dimiliki oleh masyarakat desa, tetapi hal ini disebabkan oleh covid'19. Pandemi covid'19 memiliki dampak yang sangat besar bagi dunia kerja. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 dan tahun 2018 dimana jumlah mengalami pengurangan. Angka tahun 2019 yaitu 6,52 untuk laki-laki dari 6,75 pada tahun 2018. Sedangkan untuk perempuan tahun 2019 sebesar 6,25 dari 6,39 pada tahun 2018. Hal ini tentunya banyak factor yang mempengaruhi. Terutama terkait dengan penggunaan teknologi di dunia pekerjaan. Maka dari itu pentingnya sebuah pelatihan atau pengenalan teknologi computer untuk masyarakat Indonesia. Berikut adalah data yang peneliti ambil dari desa Tanjung Medang dimana data ini menunjukkan kemampuan teknologi. Kemampuan teknologi pemuda desa Tanjung Medang terkait dengan teknologi sebesar 49% pernah menyentuh teknologi computer namun tidak mampu untuk

mengoperasikan. Sehingga ketidakmampuan ini menyebabkan pemuda didesa tidak mampu bersaing dengan pemuda yang ada di perkotaan. Untuk meningkatkan kemampuan atau skill mahasiswa dilakukan sosialisasi dan pelatihan computer sehingga pemuda mampu bersaing dan meningkatkan pendapatan.

Tabel 1. kemampuan Teknologi



Sumber: Data lapangan, 2020

Perencanaan pembangunan juga dilakukan dengan memahami keadaan penduduk disuatu daerah atau negara secara demografi. (Mantra, 2003). Pembangunan kesejahteraan sosial memiliki arti strategis bagi pembangunan nasional ada empat fungsi penting yaitu; 1) fungsi pertama mempertegas dan memperjelas peran penyelenggaraan negara; 2) fungsi kedua mewujudkan cita-cita Negara yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat; kemudian mendorong pertumbuhan pendapatan dan ekonomi masyarakat; dan selanjutnya menaikkan angka indeks pembangunan manusia (Suharto, 2008). Pembangunan juga membutuhkan ruang, baik untuk menggali sumber daya maupun sebagai tempat membangun (Abdoellah, 2016). Desentralisasi yang menguatkan kedudukan daerah dalam mengelola sumber daya alam telah meningkatkan sentimen kedaerahan dan konflik sosial, desentralisasi digunakan di beberapa daerah yang memiliki sumber daya alam untuk memekarkan diri menjadi satu daerah otonom (Abdoellah, 2016). Pembangunan dampaknya adalah ekonomi masyarakat meningkat. Dalam hal ini ekonomi sebagai disiplin yang seringkali cenderung memperlakukan pengambilan keputusan sebagai proses yang bersifat individual,

dan secara tradisional ekonom tidak banyak memberikan perhatian pada sebagaimana perilaku dan pilihan individu diletakkan pada konteks sosial yang lebih luas (Field, 2003). Meskipun pada level mikro belum adanya kaitan yang jelas antara modal sosial dengan pertumbuhan ekonomi (Field, 2003).

Kesempatan untuk menguasai teknologi antara pemuda kota dan desa sangatlah berbeda, sebab akses di kota dan desa juga berbeda. Sehingga setelah masa mencari pekerjaan masyarakat desa tidak mampu bersaing. Tidak jarang masyarakat desa memanfaatkan agen penyedia tenaga kerja dan harus mengeluarkan uang. Kesempatan kerja yang tidak pasti semakin memburuk dengan kehadiran agen penyedia jasa tenaga kerja atau “labour vendors”(De Vault, 2008) dalam (Dewayanti, 2012). Agen penyedia jasa tenaga kerja juga tidak serta merta memberikan pekerjaan secara percuma kepada calon tenaga kerjanya melainkan harus membayar untuk mendapatkan pekerjaan. Keterlibatan sektor swasta dalam kehidupan publik di perkotaan tidak hanya sebatas pada penyediaan perumahan, tetapi juga dalam penyediaan fasilitas dan pelayanan Kesehatan dan Pendidikan kelas dunia (Dewayanti, 2012). Era industry 4.0 menjadi potensi tersendiri bagi masyarakat yang mampu menguasai teknologi. Pendapat terkait dengan potensi dan manfaat Industri 4.0 yaitu perbaikan fleksibilitas produksi, kemudian pelayanan kepada konsumen dan peningkatan pendapatan masyarakat, kemudian terwujudnya potensi manfaat dan dampak positif terhadap perekonomian negara. (Sutopo, 2018).

Proses rekrutmen pekerja mengalami perubahan setelah berlakunya Undang-Undang ketenagakerjaan, periode sebelum tahun 2000, buruh mendapatkan pekerjaan melalui iklan yang dipasang perusahaan, namun yang paling sering dilakukan adalah melalui teman atau kerabat. Namun beberapa tahun ini muncul beberapa agen penyedia tenaga kerja tetap melalui mulut ke mulut dan ditempelkan di pagar pabrik atau warung-warung sekitar pabrik (Dewayanti, 2012). Sekarang iklan sudah mengalami perubahan banyak platform yang menyediakan pekerjaan secara online dan tidak jarang juga pekerjaan di posting di media sosial baik itu facebook, Instagram, whatshap dan beberapa aplikasi lainnya. Hal inilah yang menuntut pemuda desa untuk dapat menaklukan

perkembangan teknologi. Pandemi Covid'19 juga memberikan sumbangsih terhadap perubahan pengiklanan lowongan kerja.

Strategi Peningkatan Potensi Tenaga Kerja Pemuda Di Desa

Desa adalah potensi besar bagi suatu negara, di desa banyak tersedia sumber-sumber daya yang masih asri. Startegi untuk pengembangan potensi pemuda desa yaitu dengan bersatunya pemangku kepentingan (stakeholder). Stakeholder mencakup actor yang terlibat dalam proses perumusan dan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Stakeholder kebijakan public disini ada tiga menurut (Putra, 2005) dalam (Suharto, 2007), yaitu stakeholder kunci: stakeholder yang memiliki kewenangan secara legal untuk membuat keputusan., stakeholder kunci mencakup unsur eksekutif yang ada dalam pemerintah Kabupaten Muara Enim, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim, dan Dinas ketenagakerjaan kabupaten Muara Enim. Kemudian yang kedua stakeholder primer: yaitu stakeholder yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program atau proyek dimana mereka dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan penyerapan tenaga kerja. Ketiga, stakeholder sekunder: dimana stakeholder ini tidak memiliki kaitan, ataupun kepentingan langsung dengan kebijakan, yaitu program dan proyek, namun memiliki kepedulian dan perhatian sehingga mampu mempengaruhi keputusan legal pemerintah.

Strategi yang dilakukan dalam peningkatan Potensi Tenaga Kerja Pemuda di Desa

Desa merupakan salah satu objek pengabdian yang seolah tak ada habisnya, desa sebagai salah satu satuan wilayah administrasi terkecil maupun sebagai satu unit wilayah mengalami perubahan, baik perubahan secara langsung ataupun tidak langsung, sehingga banyak intervensi masuk ke desa baik melalui program-program pemerintah dan lembaga swasta maupun swadaya masyarakat (Mulyanto, Mukbar, Endah, Saputro, & Samandawai, 2009). Tentunya program-program tersebut adalah untuk mengurangi kemiskinan. Kemiskinan menurut Jeffrey D.Sach mengungkapkan bahwa ada tiga kategori kemiskinan, yaitu: 1) *extreme poverty*, yakni rumah tangga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya;

2) *moderat poverty*, yaitu rumah tangga dapat memenuhi kebutuhan dasar namun sangat minim dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan; dan 3) *relative poverty*, yakni rumah tangga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar, namun berada di bawah rata-rata cara hidup masyarakat di Negara yang bersangkutan (Huraerah, 2019). Sehingga untuk melakukan pembangunan harus dilakukan perencanaan yang terencana dengan baik, baik data dan aktor yang terlibat didalamnya. Perencanaan sangat membutuhkan data lapangan, seperti perencanaan pembangunan data kependudukan memegang peranan penting, semakin lengkap data dan akurat maka semakin mudah dalam melakukan perencanaan secara tepat. (Mantra, 2003).

Tabel 2. Strategi Pelatihan



Sumber: Pelatihan tutorial online UT dan Pelatihan ditjen e-Materi PJJ Ditjen Belmawa Kemenristekdikti, 2016 dan modifikasi peneliti, 2020

Badan Usaha Milik Desa adalah salah satu jenis pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemberdayaan adalah proses perubahan struktur yang muncul dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk kesejahteraan masyarakat, dimana perubahan itu berlangsung secara alamiah dengan anggapan bahwa setiap anggota masyarakat sebagai pelaku sosial ekonomi ikut serta dalam proses

perubahan tersebut, mempunyai produktivitas yang kurang lebih berimbang dan bertindak efisien atau rasional (Sumodiningrat, 2001). Pembangunan yang didorong masyarakat (Community Driven Development) pendekatan yang memungkinkan masyarakat memiliki kendali dalam proyek dan pengelolaan dananya yang berdasarkan prinsip pemberdayaan local, tata kelola partisipatif, tanggap atas kebutuhan, otonomi administrasi, akuntabilitas kebawah yang lebih besar dan peningkatan kapasitas lokal (Sari & Widyaningrum, 2012).

KESIMPULAN

Potensi pemuda Desa merupakan potensi yang dimiliki desa, yaitu potensi sebagai sumber daya manusia yang suatu saat akan membangun desa. Teknologi di era ini sangat penting untuk meningkatkan pendapatan manusia dengan menguasai teknologi maka akan mampu bersaing di tingkat global. Sudah sepatutnya pemuda desa menguasai teknologi komputer. Potensi ini harus didukung oleh pemerintah daerah dengan memberikan pendampingan dan pelatihan. Solusi yang dapat ditawarkan bagi pemuda desa adalah pemuda desa harus mampu menguasai teknologi komputer dengan mengikuti pelatihan atau kursus dan pemerintah harus memberikan pendampingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, O. S. (2016). *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Field, J. (2003). *Modal Sosial*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Hamdan. (2018). Industri 4.0: Pengaruh Revolusi Industri Pada Kewirausahaan Demi Kemandirian Ekonomi. *JURNAL NUSAMBA*, VOL. 3 NO.2 Oktober.
- Huraerah, A. (2019). *Kebijakan Perlindungan Sosial (Teori dan Aplikasi Dynamic Governance)*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Mantra, I. B. (2003). *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Mulyanto, D., Mukbar, D., Endah, M., Saputro, P. A., & Samandawai, S. (2009). *Kapitalisasi dalam Penghidupan Perdesaan*. Bandung: AKATIGA.
- Musiyam, M. (2008). *Orientasi Holistik Dan Kontekstual Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Indonesia*. *WARTA*, 123-130.
- Sari, Y. I., & Widyaningrum, N. (2012). Pembangunan Berbasis Masyarakat dan Kelompok Miskin di Indonesia. *Jurnal Analisis Sosial*, 159-175.
- Suharto, E. (2008). *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sumodiningrat, G. (2001). *Respinsi Pemerintah Terhadap Kesenjangan Ekonomi*. Jakarta: PT Cipta Visi Mandiri.
- Tjandraningsih, I. (2012). Kebijakan Pembangunan dan Kaum Marjinal di Indonesia : Menuju Agenda Penelitian dan Kebijakan. *Jurnal Analisis Sosial*, vii. *Jurnal Analisis Sosial*, vii.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019
- Vieronica Varbi Sununianti, r. M. (2019). *PARTISIPASI TEKNOLOGI: DINAMIKA DAN POTENSI CALON TENAGA KERJA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 (Studi Pada Mahasiswa FISIP Unsri)*. Palembang: UNSRI.